

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005). Jenis-jenis infrastruktur sebagai berikut:

1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya: bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dll.
2. Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya: pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dll.

3. Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya: pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dll.

Sedangkan menurut (Sadono, 2011) infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Infrastruktur dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan oleh karena:

1. Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Lokasi industri yang disediakan pemerintah membuat perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Penggunaan fasilitas listrik dan air dalam lokasi industri ini juga dapat mengurangi biaya.
2. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, mengurangi pengangkutan bahan mentah dan barang akhir dan mempersingkat waktu dalam membeli barang mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran.

Fasilitas infrastruktur dipahami sebagai input infrastrukural publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan finansial. Kategori fisik meliputi transportasi (rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan), listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil (*output*), pendapatan dan pertumbuhan sampingan. Infrastruktur sosial berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya, sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan akan meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, infrastruktur finansial yang meliputi kerjasama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial negara.

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Suroso, 2015).

Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja juga akan meningkatkan pendapatan perkapita. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin meningkat. Ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kuncoro, 2004).

Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan perkapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan infrastruktur. Daerah dengan pendapatan perkapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih, sedangkan daerah yang lebih maju cenderung membutuhkan infrastruktur transportasi, listrik dan telekomunikasi. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Adanya infrastruktur ini maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan perkapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita meningkat (Jhingan, 2012).

Berdasarkan klasifikasi infrastruktur di atas, dalam penelitian ini dibahas infrastruktur jalan, listrik dan irigasi. Undang-Undang No. 13 tahun 1980 tentang jalan menjelaskan bahwa jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat karena akan mempermudah mobilitas masyarakat ke daerah disekitarnya serta untuk memperlancar arus perpindahan barang dan jasa.

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011-2013 di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.366,82 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.212,89 km, jalan provinsi sepanjang 1.153,93 km. Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*) (Departemen Kementrian PU, 2013) kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 mencapai 274,76 km yang terdiri dari 11,32% kondisi jalan rusak ringan dan 11,33% dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 938,13 km atau sekitar 77,35 % kondisi jalan mantap di Sumatera Barat. Panjang jalan provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sekitar 2443,44 kilometer, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.212,91 km, jalan provinsi sepanjang 1.153,93 km. Berdasarkan kondisi jalan provinsi, sepanjang 1.017,10 km dengan kondisi jalan yang mantap. Jika dilihat dari kualitas permukaan jalan, pada umumnya jalan raya di Sumatera Barat berlapis aspal sepanjang 1.133,23 km dan sisanya tidak aspal.

Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Sumatera Barat relatif cukup. Hal ini dapat dilihat dari kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Kerapatan jalan di Sumatera Barat lebih tinggi dari kerapatan jalan nasional dan berada pada peringkat 12 bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Departemen Kementrian PU, 2013). Kerapatan jalan di daerah ini hampir dua kali lipat rata-rata kerapatan jalan nasional.

Energi listrik dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan produksi rumah tangga maupun industri agar dapat memaksimalkan output yang dihasilkan. Listrik adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang serba modern ini sehingga kebutuhan akan listrik terus meningkat. Tanpa adanya listrik roda ekonomi bisa macet total karena banyaknya pabrik dan industri besar yang menggunakan listrik dan bergantung pada listrik. Bahkan semua alat elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari penggunaan energi listrik contohnya, memasak dengan meji, menyetrika dan mengisi daya baterai hp/laptop, dll.

Berdasarkan data Statistik PLN 2013 listrik memfasilitasi industrialisasi di Sumatera Barat. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik perkapita, konsumsi listrik di Sumatera Barat relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional sebesar 753,7 kwh sehingga Sumatera Barat mengalami defisiensi infrastruktur listrik tahun 2013. Hal ini di sebabkan karena infrastruktur listrik Sumatera Barat masih ketinggalan dari provinsi lain di Indonesia yang mana defisiensi tersebut dapat dilihat dari korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita.

Irigasi penting dalam dunia pertanian khususnya pada lahan persawahan untuk mengairi dan memberikan pasokan air di lahan pertanian. Irigasi memberikan pasokan air untuk lahan pertanian, sehingga petani tidak perlu takut lagi kekurangan air apalagi pada saat musim kemarau serta mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai output yang maksimal dan ketahanan pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional (Hansen, 1992).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS luas potensial jaringan irigasi di Sumatera Barat tahun 2011 meliputi 282.238 hektar atau 3,83% dari jaringan irigasi potensial di Indonesia. Jaringan irigasi terbangun tersier sekitar 279.227 hektar dan luas jaringan irigasi utama sekitar 280.538 hektar. Sementara menurut kewenangan, sekitar 90.620 hektar (29%) kewenangan pusat, 51.136 hektar (16%) kewenangan provinsi, dan 169.033 hektar (54%) kewenangan kabupaten/kota.

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang menjelaskan bahwa infrastruktur tersebut cukup banyak jenisnya, tetapi dalam penelitian ini penulis membatasi infrastruktur hanya tiga jenis yang diteliti pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat Sumatera Barat, karena ketiga jenis itu yang dianggap sangat kuat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang penulis maksud adalah jalan, listrik dan irigasi. Sehingga rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur irigasi terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah membatasi tiga infrastruktur yang mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat diantaranya jalan, listrik dan irigasi, karena jalan merupakan sarana yang menjadi penghubung dalam melakukan segala kegiatan perekonomian terutama kegiatan ekonomi menggunakan fasilitas darat. Listrik adalah faktor terpenting dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi seperti pabrik sehingga listrik bisa dikatakan kebutuhan primer bagi pelaku ekonomi. Irigasi erat kaitannya dengan pertanian. Sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur listrik terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur irigasi terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna didalam memahami pengaruh infrastruktur terhadap pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan didalam perencanaan perkembangan infrastruktur.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pendapatan perkapita masyarakat dengan mengungkap secara empiris.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian yaitu penelitian menggambarkan pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan irigasi terhadap pendapatan perkapita masyarakat. Pengaruh infrastruktur yang dimaksud disini adalah pengaruh jumlah ketersediaan infrastruktur tersebut dan hubungannya dengan pendapatan perkapita masyarakat. Daerah penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat waktu penelitian (*times series*) yang digunakan dimulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan dari penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang defenisi operasional variabel, lokasi penelitian, teknik dan metode analisis data, dan uji statistik.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan panjang jalan, konsumsi dan produksi listrik, luas sawah irigasi dan sawah non irigasi dan pendapatan perkapita Sumatera Barat.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

